



Implementasi Program Sekolah Ramah Anak Dalam Meningkatkan Kesadaran Hak Asasi Manusia di Kalangan Siswa Sekolah Paket A di PKBM Permai Kec. Tanjung Morawa

Sri Lili Winarti¹, Samsul Bahri²

Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: srililiwinarti@umnaw.ac.id^{1*}, samsulbahri@umnaw.ac.id²

Article received: 06 Mei 2025, Review process: 17 Mei 2025

Article Accepted: 25 Juni 2025, Article published: 02 Juli 2025

ABSTRACT

The high incidence of violence against children in educational settings remains a pressing issue, particularly in non-formal education sectors with limited oversight mechanisms. This study aims to analyze the implementation of the CFS Program in enhancing human rights awareness among Package A students at PKBM Permai, Tanjung Morawa District. The research employed a qualitative descriptive approach using in-depth interviews, participatory observation, and documentation, involving 21 students and 8 educators as key informants. The findings indicate that implementation strategies include multi-stakeholder socialization, teacher training based on the 3P principles (Provision, Protection, Participation), and participatory learning models. The program has positively impacted students' awareness of their rights to be protected, heard, and actively involved in school activities. Nevertheless, challenges such as limited resources, low teacher capacity, and environmental issues have hindered full program effectiveness. The study recommends stronger collaboration among stakeholders and the integration of the CFS approach into sustainable equivalency education policies.

Keywords: Child-Friendly School, Human Rights, Non-Formal Education

ABSTRAK

Tingginya angka kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan menjadi persoalan serius yang memerlukan respons sistemik, terutama dalam pendidikan non formal yang belum sepenuhnya terlindungi oleh sistem pengawasan yang ketat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program SRA dalam meningkatkan kesadaran hak asasi manusia (HAM) di kalangan siswa Sekolah Paket A di PKBM Permai Kecamatan Tanjung Morawa. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari 21 siswa dan 8 pendidik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi implementasi melibatkan sosialisasi lintas pihak, pelatihan guru berbasis nilai 3P (Provisi, Proteksi, Partisipasi), dan pembelajaran partisipatif. Dampak program terlihat dalam peningkatan kesadaran siswa terhadap hak mereka untuk dilindungi, didengar, dan berpartisipasi aktif di sekolah. Meskipun demikian, kendala seperti keterbatasan sumber daya, rendahnya kapasitas guru, dan isu lingkungan eksternal turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan program. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sinergi antar pemangku kepentingan dan pengintegrasian SRA ke dalam kebijakan pendidikan kesetaraan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Sekolah Ramah Anak, Hak Asasi Manusia, Pendidikan Non-Formal

PENDAHULUAN

Isu perlindungan terhadap anak telah menjadi perhatian global, terutama seiring meningkatnya kasus kekerasan fisik, verbal, seksual, dan perundungan yang dialami anak-anak, baik di rumah, sekolah, maupun lingkungan sosial. Anak sebagai individu yang sedang berkembang memerlukan perlakuan dan perlindungan khusus guna menjamin tumbuh kembang yang optimal, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Namun dalam praktiknya, kebutuhan dan hak anak sering kali diabaikan karena masih kuatnya anggapan bahwa anak hanyalah versi kecil dari orang dewasa yang tidak memiliki otoritas atas dirinya sendiri.

Secara normatif, hak anak dilindungi oleh berbagai instrumen hukum, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Pasal 1 ayat 4, 5, dan 6 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Perlindungan ini merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dan negara. Dalam konteks ini, sekolah memiliki peran strategis sebagai institusi pendidikan yang tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, seperti penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM), empati, dan solidaritas.

Hak Asasi Manusia merupakan hak mendasar yang melekat pada setiap individu, termasuk anak-anak. Oleh sebab itu, pendidikan tentang HAM seharusnya dimulai sejak dini, agar terbentuk kesadaran dan sikap yang menghargai hak orang lain. Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menginisiasi Program Sekolah Ramah Anak (SRA), yang bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan bebas dari diskriminasi. Program ini menekankan pada prinsip 3P: Provisi (pemenuhan), Proteksi (perlindungan), dan Partisipasi (keikutsertaan) anak dalam kegiatan sekolah.

Keberadaan Sekolah Paket A di berbagai daerah merupakan bentuk layanan pendidikan non-formal yang sangat penting bagi anak-anak yang tidak mengakses pendidikan dasar reguler. PKBM Permai di Kecamatan Tanjung Morawa menjadi salah satu lembaga pendidikan kesetaraan yang mengadopsi Program SRA untuk menciptakan suasana belajar yang lebih inklusif dan mendidik siswa agar menyadari hak-hak dasar mereka sebagai manusia. Hal ini menjadi upaya preventif untuk membentuk karakter siswa yang kritis, peduli, dan menghormati sesama.

Namun demikian, implementasi Program SRA di PKBM Permai menghadapi berbagai tantangan. Beberapa kendala yang ditemui meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur, rendahnya pelatihan guru terkait pendidikan HAM, hingga masih terbatasnya partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran yang demokratis. Disparitas dalam gaya belajar siswa dan ketimpangan akses terhadap fasilitas pendidikan juga memperkuat hambatan tersebut, sehingga dibutuhkan strategi dan intervensi yang lebih sistematis dalam pelaksanaan program.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Sekolah Ramah Anak dalam meningkatkan kesadaran hak asasi manusia di kalangan siswa Sekolah Paket A di PKBM Permai Kecamatan Tanjung Morawa, dengan menelaah strategi pelaksanaan, faktor pendukung dan penghambat, serta dampak program terhadap pemahaman siswa mengenai HAM.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam implementasi Program Sekolah Ramah Anak di PKBM Permai Kecamatan Tanjung Morawa dalam meningkatkan kesadaran hak asasi manusia di kalangan siswa Sekolah Paket A. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi terhadap berbagai kegiatan dan kebijakan program yang relevan. Informan penelitian terdiri dari 21 siswa dan 8 pendidik atau tenaga kependidikan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program. Data dianalisis secara tematik dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sebagaimana dianjurkan oleh Miles dan Huberman (1994), guna memperoleh pemahaman komprehensif mengenai efektivitas dan tantangan dalam implementasi program tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Implementasi Program Sekolah Ramah Anak

Implementasi Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di PKBM Permai dimulai dengan strategi komunikasi yang menyeluruh kepada seluruh pemangku kepentingan. Pihak sekolah mengadakan sosialisasi intensif kepada guru, siswa, dan orang tua mengenai nilai-nilai dasar dalam SRA, terutama yang berkaitan dengan hak asasi anak. Strategi ini sejalan dengan pendapat Karlina (2008) yang menyatakan bahwa keberhasilan program pendidikan berbasis nilai memerlukan komunikasi lintas pihak secara konsisten dan berkelanjutan. Pelibatan orang tua turut memperkuat keberlanjutan program melalui sinergi pendidikan di rumah dan di sekolah.

Selanjutnya, pelatihan kepada guru menjadi fokus utama dalam tahap awal implementasi. Guru diberikan materi tentang prinsip 3P (Provisi, Proteksi, Partisipasi) agar mampu menyusun rencana pembelajaran yang ramah anak. Hafifah dan Aini (2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kompetensi guru dalam memahami nilai-nilai hak asasi anak berpengaruh terhadap penerapan pembelajaran yang beretika dan inklusif. PKBM Permai menunjukkan keseriusan dalam penguatan kapasitas tenaga pendidik melalui pendekatan partisipatif dan reflektif dalam pelatihan.

Penerapan prinsip *Provisi* diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan dasar siswa di lingkungan belajar. Sarana seperti ruang kelas, alat peraga, serta materi ajar disesuaikan dengan kondisi siswa, mengingat banyak dari mereka adalah anak-anak yang sebelumnya tidak bersekolah. Hal ini sesuai dengan

pendekatan kebutuhan dasar dalam teori Abraham Maslow, di mana pemenuhan kebutuhan fisik dan rasa aman menjadi dasar tercapainya aktualisasi diri dalam proses belajar.

Sementara itu, aspek *Proteksi* direalisasikan dengan kebijakan nol toleransi terhadap segala bentuk kekerasan di lingkungan sekolah. Guru dibekali keterampilan untuk mendeteksi gejala bullying dan diberikan pedoman dalam menangani kasus kekerasan verbal maupun fisik. Penelitian Triwahyuningsih (2018) menunjukkan bahwa perlindungan anak dalam pendidikan perlu dilengkapi dengan sistem pelaporan yang aman dan prosedur tindak lanjut yang jelas, yang juga diterapkan oleh PKBM Permai dalam kerja sama dengan lembaga perlindungan anak setempat.

Aspek *Partisipasi* siswa dikembangkan melalui forum siswa, diskusi kelompok, dan proyek-proyek kolaboratif yang memberi ruang kepada siswa untuk menyuarakan pendapat. Penekanan pada partisipasi aktif ini sejalan dengan prinsip pedagogi kritis Paulo Freire yang menekankan bahwa siswa bukan sekadar objek, melainkan subjek yang aktif dalam proses pembelajaran. Melalui ruang partisipatif ini, siswa dilatih untuk menyampaikan ide dan kritik secara konstruktif.

Selain itu, struktur kelembagaan sekolah disesuaikan untuk mendukung kelancaran program. Meskipun belum ada struktur khusus, program SRA dimasukkan dalam agenda mingguan dan rapat guru. Hal ini mengacu pada temuan Majdi dan Shofiyuddin (2021) yang menyatakan bahwa fleksibilitas organisasi penting untuk keberhasilan program yang berbasis nilai seperti SRA, terlebih dalam lembaga non-formal seperti PKBM.

Secara keseluruhan, strategi implementasi yang dilakukan menunjukkan bahwa PKBM Permai telah berupaya menyusun pendekatan yang sistematis, partisipatif, dan berkelanjutan. Hal ini membuktikan bahwa lembaga pendidikan non-formal juga mampu mengadopsi prinsip-prinsip modern dalam pendidikan inklusif dan berorientasi pada hak asasi manusia.

Dampak Program terhadap Kesadaran HAM Siswa

Dampak positif dari implementasi SRA mulai terlihat dalam bentuk peningkatan kesadaran siswa terhadap hak-haknya sebagai individu. Siswa mulai memahami bahwa mereka memiliki hak untuk didengar, dilindungi, dan mendapatkan pendidikan yang bermartabat. Hal ini tampak dari hasil wawancara yang menunjukkan bahwa sebagian besar siswa menyatakan merasa lebih dihargai dan nyaman dalam belajar. Penemuan ini senada dengan Rahmiati dan Riska (2021), yang menekankan bahwa pendidikan HAM yang dimulai dari ruang kelas dapat membentuk karakter siswa menjadi lebih demokratis dan kritis.

Program ini juga mendorong perubahan dalam cara berpikir siswa terhadap hubungan sosial. Mereka mulai menunjukkan sikap empati, tolong-menolong, dan menghargai perbedaan. Dalam observasi di kelas, siswa yang dulunya pasif dan cenderung menyendiri kini lebih terlibat dalam diskusi kelompok dan kegiatan kolaboratif. Perubahan ini menunjukkan keberhasilan

pendekatan sosial-emosional dalam pendidikan berbasis hak anak, seperti yang diungkapkan oleh Misnatun (2006) bahwa pendidikan ramah anak mampu membentuk karakter moral dan sosial yang kuat pada peserta didik.

Partisipasi siswa dalam pengambilan keputusan sekolah juga meningkat. Mereka mulai aktif menyampaikan aspirasi, baik melalui forum resmi seperti rapat kelas maupun dalam kegiatan informal. Perubahan ini menunjukkan bahwa program telah berhasil menumbuhkan keberanian dan rasa percaya diri siswa, sebagaimana ditekankan oleh teori partisipasi Arnstein (1969) yang menyatakan bahwa keterlibatan siswa dalam pengambilan keputusan mencerminkan tingkat partisipasi yang tinggi dalam sistem demokratis di sekolah.

Dampak lainnya adalah meningkatnya kesadaran siswa akan pentingnya lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Mereka mulai turut menjaga kebersihan, ketertiban, dan ketenangan di sekolah. Sebagian siswa bahkan secara sukarela membantu guru menata ruang kelas dan memberi laporan bila terjadi pelanggaran. Ini menguatkan pendapat Arikunto (2004) bahwa internalisasi nilai perlu didukung dengan tindakan nyata dalam keseharian siswa agar menjadi kebiasaan.

Kesadaran terhadap isu kekerasan dan pelecehan juga meningkat. Siswa menjadi lebih terbuka untuk melapor dan meminta bantuan jika mengalami perlakuan tidak adil. Ini menunjukkan keberhasilan program dalam membangun iklim kepercayaan antara guru dan siswa, sebagaimana dicatat oleh Hafifah dan Aini (2021) bahwa hubungan guru-siswa yang berbasis kepercayaan merupakan fondasi pendidikan karakter yang efektif.

Selain peningkatan individu, program ini juga mendorong transformasi budaya sekolah menjadi lebih inklusif. Guru dan siswa mulai menunjukkan sikap toleran terhadap siswa yang memiliki kebutuhan khusus atau berasal dari latar belakang berbeda. Penerimaan ini menjadi indikator bahwa nilai-nilai hak asasi mulai melekat dalam sistem sosial sekolah. Penelitian Muchlisin et al. (2020) juga menemukan bahwa inklusivitas dalam pendidikan alternatif menjadi landasan penting untuk mewujudkan keadilan sosial dalam pendidikan.

Dari keseluruhan data, dapat disimpulkan bahwa Program SRA telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesadaran hak asasi manusia siswa. Efek ini tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotorik, mencerminkan pencapaian tujuan pendidikan holistik yang ditargetkan oleh program.

Tantangan dan Faktor Pendukung Pelaksanaan Program

Meskipun implementasi Program SRA menunjukkan hasil yang menggembirakan, sejumlah tantangan masih dihadapi oleh PKBM Permai. Tantangan pertama adalah keterbatasan sumber daya, terutama dalam hal finansial dan infrastruktur. Fasilitas belajar yang tersedia belum sepenuhnya ramah anak, terutama untuk siswa berkebutuhan khusus. Temuan ini memperkuat pendapat Utami (2022) yang menyatakan bahwa pendidikan

kesetaraan masih mengalami kesenjangan pendanaan, sehingga diperlukan intervensi pemerintah yang lebih serius.

Selain itu, belum tersedianya struktur organisasi khusus di sekolah untuk menangani Program SRA secara mandiri mengakibatkan lemahnya koordinasi dan pengawasan. Program ini masih menjadi bagian dari tugas tambahan bagi guru, tanpa alokasi waktu dan beban kerja yang jelas. Hal ini sejalan dengan kritik Karlina (2008) terhadap pelaksanaan program pendidikan berbasis nilai yang seringkali tidak terintegrasi dalam sistem manajerial sekolah.

Keterbatasan kompetensi guru juga menjadi tantangan penting. Meskipun telah diberikan pelatihan awal, sebagian guru masih menunjukkan kesulitan dalam menerapkan pendekatan pembelajaran yang partisipatif dan berorientasi pada hak anak. Sebagaimana disampaikan oleh Wiwin (2018), keberhasilan implementasi program pendidikan nilai sangat tergantung pada kemampuan guru dalam memfasilitasi proses pembelajaran yang reflektif dan dialogis.

Polusi udara dari limbah asap pabrik di sekitar lingkungan sekolah juga menjadi gangguan serius terhadap kesehatan dan kenyamanan siswa. Dalam observasi, siswa mengeluhkan sesak napas dan gangguan konsentrasi ketika belajar. Ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak tidak hanya terbatas pada aspek sosial dan psikologis, tetapi juga menyangkut hak atas lingkungan yang sehat, sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak PBB dan UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002.

Namun demikian, program ini juga didukung oleh sejumlah faktor pendorong. Komitmen dari pihak pengelola sekolah, guru, dan orang tua menjadi modal sosial penting dalam mempertahankan keberlanjutan program. Penelitian Majdi dan Shofiyuddin (2021) menegaskan bahwa keberhasilan SRA sangat bergantung pada komitmen kolektif seluruh warga sekolah dalam menciptakan budaya positif yang konsisten.

Partisipasi siswa juga menjadi kekuatan utama program ini. Keterlibatan aktif mereka dalam berbagai kegiatan sekolah menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab. Hal ini sejalan dengan teori konstruktivisme sosial yang dikemukakan oleh Vygotsky, bahwa pembelajaran yang bermakna terbentuk melalui interaksi sosial dan partisipasi aktif dalam lingkungan belajar.

Sebagai refleksi akhir, tantangan yang dihadapi harus dipandang sebagai peluang untuk perbaikan. Dengan memperkuat pelatihan guru, meningkatkan anggaran, dan menjalin kerja sama dengan pihak luar seperti Dinas Pendidikan dan LSM, diharapkan Program Sekolah Ramah Anak di PKBM Permai dapat menjadi model pendidikan berbasis HAM yang adaptif dan berkelanjutan di lembaga pendidikan non-formal lainnya.

SIMPULAN

Kesimpulan, implementasi program ini telah dilaksanakan melalui komunikasi yang intensif kepada seluruh elemen sekolah, pemanfaatan sumber daya yang tersedia, dan penerapan model pembelajaran CFTM berbasis prinsip 3P (Provisi, Proteksi, dan Partisipasi). Meskipun sekolah menunjukkan disposisi yang

positif dan komitmen tinggi terhadap program, implementasi masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya finansial, sarana untuk anak berkebutuhan khusus, serta polusi asap pabrik yang mengganggu kesehatan. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan keterlibatan aktif Dinas Pendidikan dalam perluasan dan pendanaan program, upaya sekolah dalam penghijauan dan advokasi lingkungan, peningkatan kreativitas guru dalam pembelajaran, serta partisipasi aktif siswa dalam menjaga lingkungan dan memahami hak-haknya sebagai bagian dari proses pendidikan yang ramah anak.

DAFTAR RUJUKAN

- Arikunto, S. (2004). *Evaluasi program pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hafifah, M., & Aini, Z. N. (2021). Efektivitas program Sekolah Ramah Anak dalam pembentukan karakter positif pada anak kelompok B usia 5–6 tahun di RA Labschool IIQ Jakarta. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 2(1). <https://doi.org/10.31219/osf.io/2s7wc> (jika tidak ada DOI, bisa dituliskan sebagai retrieved from URL jika tersedia)
- Barus, H. (2014). *Metodologi penelitian pendidikan PPKn*. FKIP Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah.
- Iskandar, U. (2015, Agustus 25). Pengertian dan standar sekolah sehat. Retrieved February 25, 2016, from <http://urayiskandar.blogspot.co.id/2015/08/pengertian-dan-standar-sekolah-sehat.html?m=1>
- Karlina, Y. D. S. (2008). Implementasi program Sekolah Ramah Anak di SD Putren Pleret Bantul. *Jurnal Penelitian Pendidikan FIP UNY*, 8(2), 101–114.
- Moleong, L. J. (2002). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Majdi, M., & Shofiyuddin, A. I. (2021). Sekolah Ramah Anak terhadap pengembangan sosial-emosional anak di SD Negeri Ngupasan Yogyakarta. *Jurnal Media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan*, 17(1), 1–11.
- Misnatun. (2006). Pola pembentukan karakter anak melalui pendidikan ramah anak dalam perspektif pendidikan Islam. *Tadarus: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(2), 1–19.
- Muchlisin, A., Zuber, A., & Haryono, B. (2020). Peran pendidikan alternatif dalam menanggulangi siswa putus sekolah. *Society*, 8(2), 719–731. <https://doi.org/10.33019/society.v8i2.234>
- Purwanto. (2007). *Instrumen penelitian sosial dan pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahmiati, F., & Riska, A. (2021). Implementasi pendidikan dalam hak asasi manusia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Hukum*, 5(3). <https://doi.org/10.31219/osf.io/k9pt7> (gunakan link atau DOI resmi jika tersedia)
- Sugiyono. (2011). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Triwahyuningsih, S. (2018). Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 113–121.

- Utami, P. (2022, Oktober 21). Pendanaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan ditingkatkan. Retrieved from <https://asatunews.co.id/index.php/indeks-ind24jam/7132-pendanaan-pendidikan-anak-usia-dini-dan-pendidikan-kesetaraan-ditingkatkan>
- Wiwin, Y. (2018). Metode penelitian deskriptif kualitatif dalam perspektif bimbingan dan konseling. *Qalamuna: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama*, 2(2), 21–30. <https://doi.org/10.22460/q.v2i1p21-30.642>